

**Analisis pembinaan koperasi sebagai program penanggulangan kemiskinan di
kabupaten Rokan Hulu**

**Riski Makmur/0801131583
Dosen Pembimbing: Drs. H. Ali Yusri, MS**

**Kampus Universitas Riau Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293
(0761) 63277, 35675
Email : riskimakmur_riskimakmur@yahoo.com
082165208541**

ABSTRACT

This study wanted to see cooperatives as a coaching analysis of poverty reduction programs in Rokan Hulu district . The problem is the background of this research are :

- 1 . How is the development of a cooperative partner with the company in Rokan Hulu district?*
- 2 . What factors are the bottlenecks in developing cooperative in Rokan Hulu ?*

This study is a qualitative research , the data collection techniques in this study is a descriptive analysis . This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as information objects that aim to achieve goals for the sake of getting information in the study . Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with key informants in this study .

Based on the research and discussion that has been the writer explained in the previous chapter are based on the formulation of the problem , the authors conclude that the Cooperative Program in Rokan Hulu is one of the main programs that successfully participate in reducing poverty in Rokan Hulu to create new job opportunities for the community Rokan Hulu .

However, this program can not be used as the main government program Rokan Hulu in the alleviation of poverty , because there are other programs that are also successful in reducing poverty in Rokan Hulu .

Keywords : cooperatives , local governments , development

Latar Belakang

Salah satu bentuk kongkrit dari solusi pengentasan kemiskinan di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan mengeluarkan kebijakan program Kegiatan Koperasi. Program Koperasi di Kabupaten Rokan Hulu dinilai paling berhasil di Provinsi Riau. Atas prestasinya tersebut, pemerintah pusat menetapkan daerah

tersebut sebagai Kabupaten Koperasi. Untuk menjadi Kabupaten Koperasi, minimal 70% kecamatannya sudah berjalan dengan baik kegiatan koperasinya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pembinaan koperasi yang berkelanjutan dan menjadikan koperasi sebagai pilar dan lokomotif perekonomian masyarakat. Terkait program koperasi Bupati Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perkebunan baik Perusahaan Pemerintah maupun Swasta harus Bermitra dengan Koperasi, sehingga para pekerja yang dilibatkan juga mayoritas adalah rekomendasi dari koperasi. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pembinaan koperasi yang berkelanjutan dan menjadikan koperasi sebagai pilar dan lokomotif perekonomian masyarakat di Negeri Seribu Suluk (julukan Kabupaten Rokan Hulu). Pembinaan koperasi yang dilakukan selama ini, menjunjung asas kekeluargaan, sehingga terjadi hubungan komunikasi timbal balik dengan Satuan Kerja.

Citra Koperasi sangat ditentukan oleh pengurus koperasi. Ketika Koperasi semakin berkembang, pastinya dikarenakan oleh disiplinnya pengurus, salah satunya adalah bertindak jujur dan baik. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan mendirikan koperasi unggulan di setiap kecamatan. Terkait program Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang menginginkan banyaknya koperasi unggulan di Kabupaten Rokan Hulu dimana mampu memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Agar kedepannya dapat mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten Koperasi terbaik di tingkat Provinsi Riau maupun ditingkat nasional dengan memulainya melalui konsep pendirian koperasi unggulan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Agar kedepannya dapat mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten Koperasi terbaik di tingkat Provinsi Riau maupun ditingkat nasional dengan memulainya melalui konsep pendirian koperasi unggulan di setiap kecamatan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan kemitraan tersebut bagi perusahaan-perusahaan besar dalam bidang pertanian yang banyak di Kabupaten Rokan Hulu dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang di dalamnya terkandung unsur untuk “membantu dan membina” koperasi dan usaha kecil. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Didalam koperasi ada pula kelebihan dan kekurangannya yang semestinya perlu kita ketahui dalam membentuk keadilan didalamnya, kerja sama yang erat dan juga wadah untuk mengelola usaha dengan baik. Tidak terlepas dari itu ternyata permasalahan pun masih tetap ada, seperti kurangnya modal, dan perhatian dari pemerintah. Kemudian juga menurut penulis peran pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi sebagai salah satu alat untuk memberantas kemiskinan belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga penulis merasa permasalahan ini harus diteliti lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Kerangka Teoritis

Menurut **Ferd. R. David (2006:8)**, strategi manajemen adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan, strategi pemerintah dengan tantangan lingkungan dan direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama pemerintah dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh penyelenggaraan pemerintah. Strategi merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan akhir (sasaran), akan tetapi strategi adalah rencana yang disatukan dan strategi dari pemerintah kota dapat mengikat semua bagian penyelenggara pemerintah menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua

aspek penting dalam pemerintah maupun penasehat swasta serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian (Ferd R. David, 2006;11).

Istilah Kebijakan (*policy*) pada prinsipnya didefinisi cukup beragam, tergantung para ahli dengan berbagai macam pengertiannya. Menurut Robert Eyston mendefinisikan kebijakan (*policy*) sebagai “The relationship of a government unit to its environment” (hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan) sedangkan menurut Carl J. Friedrich (dalam Hosio, 2007 : 2) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu. Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Solichin dalam Waluyo (2007 : 44) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan definisi kebijakan sebagai “segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan. Menurut Syauckani (2005 : 43), implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakannya kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup :

1. Persiapan serangkaian peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan.
3. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkret kemasyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh pada tujuan kebijakan. Sebab tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kebijakan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hassel Nogi (2003 : 13) yang mengatakan tujuan kebijakan implementasi adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dapat direalisasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2003 :158).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kompleksitasnya persoalan kemiskinan setidaknya harus segera mendapatkan solusi dan koperasi merupakan salah satu cara yang bisa mengurangi kemiskinan apabila dijalankan dengan baik oleh masyarakat dibantu oleh pemerintah.

Dengan demikian maka pertanyaan penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah perkembangan koperasi yang bermitra dengan perusahaan di kabupaten Rokan Hulu?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengembangkan koperasi di Rokan Hulu?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perkembangan koperasi yang bermitra dengan perusahaan di kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mengembangkan koperasi di Rokan Hulu. mempengaruhinya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan perkembangan koperasi di kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang perkembangan koperasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (**Hadari Nawawi, 1990**). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (**Suharsimi Arikunto, 1996**). Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (**Lexi J Moeloeng, 2000**).

Sementara **Sugiyono (1998)**, mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dipilih sebagai fokus lokasi penelitian dikarenakan menjadi satu-satunya di Provinsi Riau yang mendapatkan predikat Kabupaten Koperasi di Provinsi Riau dan diakui oleh nasional melalui penghargaan yang didapatkannya.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi tentang mengapa Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengembangan Koperasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan 2012. Informan yang menjadi fokus penelitian merupakan orang-orang yang terlibat dan mengetahui dan bersinggungan dengan kebijakan koperasi di Kabupaten Rokan Hulu

Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Key Informan Penelitian

No	Jabatan atau Kedudukan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu	1 orang
2.	Kepala Bidang Koperasi	1 orang
3.	Pengurus dan Anggota Koperasi	10orang
4.	Pengamat ekonomi	2 orang
	Jumlah	14 Orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

4. Data-data yang diperlukan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara terkait mengapa program Koperasi tidak dijadikan sebagai Program utama dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011. Sumber data primer ini meliputi wawancara dengan informan.
2. Data Sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian, seperti telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung baik kepada aparat pemerintah, masyarakat dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya pengamat ekonomi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi komprehensif.

2. Dokumentasi

Yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

6. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang baeranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengn bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggota. Koperasi menurut UU No 25/1992 tentang perkoperasian sebagai berikut “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdaar atas kekeluargaan”

Definisi koperasi:

1. Muhammad Hatta (1994): Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

2. ILO (dikutip oleh Edilius dan Sudarsono, 1993): Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
3. Dr.G.Mladenata, di dalam bukunya *Histoire Desdactrines Cooperative* mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
4. H.E.Erdman dalam bukunya *Passing Monopoly as an aim of Cooperative* bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan", sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : "Badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Prinsip koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- Kemandirian.
- Pendidikan perkoperasian.
- kerjasama antar koperasi.

Jenis-jenis koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran

- Koperasi Jasa

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah(UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahanbakudan penolong untuk anggotanya.

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan koperasi yang bermitra dengan perusahaan di kabupaten Rokan Hulu.

Kebijakan mengenai koperasi yang bermitra dengan perusahaan diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perkebunan baik Perusahaan Pemerintah maupun Swasta harus Bermitra dengan Koperasi, sehingga para pekerja yang dilibatkan juga mayoritas adalah rekomendasi dari koperasi. Dengan melakukan kerja sama dengan antara koperasi dan perusahaan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, antara lain yaitu bagi masyarakat yang tergabung dalam koperasi lebih mempunyai posisi tawar dalam menjual hasil pertaniannya. Sedangkan bagi perusahaan akan lebih terjamin pemasukannya karena koperasi sudah pasti akan menjual hasil panen nya kepada perusahaan. Memperoleh keuntungan yang disebabkan karena bisa beroperasi secara besar-besaran. Disamping itu dengan bekerjasamanya perusahaan dengan koperasi masyarakat secara langsung akan membantu membangun perekonomian masyarakat itu sendiri.

- Fungsi dan peran koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.

- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja kerjasama ini harus didasarkan prinsip usaha yang saling menguntungkan.

Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, koperasi lain yang dengan mitra usahanya masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya.
2. Tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama itu dalam bentuk kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka “membantu dan membina” koperasi.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mencoba melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan koperasi serta koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Drs. H. Zulkarnain, MM mengatakan bahwa sejak tahun 2007 pada saat dibentuknya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah mencanangkan visi tentang realisasi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten Koperasi di Provinsi Riau. Didalam misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu poin nomor satu dengan jelas mengatakan bahwa menumbuhkembangkan, membina dan memfasilitasi kegiatan usaha koperasi serta menunjukan koperasi aktif dan sehat pada setiap kelurahan dan desa. *Alhamdulillah* hal tersebut setiap tahunnya sedikit demi sedikit dapat tercapai. Bahkan sampai hari ini hampir diseluruh Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu memiliki Koperasi. Walaupun masih ada beberapa Desa yang status koperasinya belum terlalu aktif. Namun sejak tahun 2007 jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hulu grafik jumlah koperasi selalu naik walaupun tidak selalu signifikan disetiap tahunnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah koperasi, itu artinya semakin bertambah pula jumlah anggota koperasi dan tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Aktifitas Kegiatan Koperasi bukan saja dalam hal mensejahterakan anggotanya tetapi juga masyarakat lainnya yang bekerja sebagai tenaga pembantuan di koperasi, karena aktifitas kegiatan koperasi meliputi banyak hal, termasuk buruh sawit, buruh karet, supir pengangkut sawit dan karet serta masih banyak lainnya yang secara bersamaan menciptakan lahan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Syafrudin, ketua koperasi Sawit Harapan Jaya yang berlokasi di Surau Tinggi Kecamatan Rambah Hilir mengatakan bahwa sejak Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan

Perkebunan baik Perusahaan Pemerintah maupun Swasta harus Bermitra dengan Koperasi, sehingga para pekerja yang dilibatkan juga mayoritas adalah rekomendasi dari koperasi.

- **Manfaat kerja sama antara koperasi dan perusahaan**

Dengan melakukan kerja sama dengan antara koperasi dan perusahaan dapat keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tergabung dalam koperasi lebih mempunyai posisi tawar dalam menjual hasil pertaniannya.
2. Bagi perusahaan akan lebih terjamin pemasukannya karena koperasi sudah pasti akan menjual hasil panen nya kepada perusahaan.
3. Memperoleh keuntungan yang disebabkan karena bisa beroperasi secara besar-besaran.
4. membantu membangun perekonomian masyarakat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 94/Kpts/OT.210/10/1997 Pasal 1, Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Dalam surat keputusan tersebut juga diatur tentang tujuan kemitraan dan pelaku kemitraan usaha pertanian, yang di rangkum dalam Pasal 2, masing-masing berbunyi: (ayat 1) Tujuan Kemitraan Usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. (ayat 2)Pelaku Kemitraan usaha pertanian meliputi: petani nelayan, kelompok petani nelayan, gabungan kelompok tani nelayan, koperasi dan usaha kecil; yang selanjutnya kelompok kemitraan: perusahaan menengah pertanian, perusahaan besar pertanian, perusahaan menengah dibidang pertanian, perusahaan besar di bidang pertanian, yang selanjutnya disebut perusahaan mitra. Dengan demikian perkembangan koperasi yang bermitra dengan perusahaan di kabupaten Rokan Hulu sudah cukup banyak contohnya dapat dilihat kecamatan yang menjadi tempat penelitian saya. Adapun kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Rambah yang banyak terdapat perkebunan karet, kecamatan Kepenuhan yang memiliki banyak perkebunan sawit dan terdapat perusahaan yang mengolah sawit disana.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mengembangkan koperasi di kabupaten Rokan Hulu

Setelah melakukan penelitian didapati beberapa alasan tidak dijadikannya kebijakan koperasi sebagai program utama dalam menaggulangi kemiskinan, dibagi kedalam dua faktor yaitu internal dan external :

Faktor Internal

1. Kurangnya Partisipasi Anggota

Bagaimana mereka bisa berpartisipasi lebih kalau mengenai koperasi saja mereka tidak mengerti. Hasilnya anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya baik itu kontributif maupun insentif terhadap kegiatan koperasi sendiri. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi ditengarai menjadi faktor utamanya, karena para pengurus beranggapan hal tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi diri mereka pribadi.

2. Sosialisasi Koperasi

Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman.

3. Manajemen yang kurang baik

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategi dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha.

4. Sumber Daya Manusia

Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

Faktor External

1. Permodalan Yang Minim

Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah.

3. Demokrasi Ekonomi yang Kurang

Dalam arti kata demokrasi ekonomi yang kurang ini dapat diartikan bahwa masih ada banyak koperasi yang tidak diberikan keleluasaan dalam menjalankan setiap tindakannya.

Ada pun kendala lain berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang koperasi Bapak Suryanto yaitu kurangnya anggaran dari APBD untuk mengembangkan koperasi, beliau mengatakan pada tahun 2010 memang ada dana bantuan dari pemerintah untuk pengembangan koperasi sebanyak 10 juta rupiah kepada setiap unit koperasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Tapi setelah itu pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada lagi dana bagi pengembangan koperasi dari Pemkab Rohul yang dianggarkan di APBD. Ketika ditanya alasan tidak dianggarkan, beliau enggan untuk menyatakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya yang berdasarkan pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Program koperasi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu program yang dilakukan untuk memberantas kemiskinan. Tetapi sayangnya program ini kurang berjalan dengan baik dan tidak sesuai antara pemberitaan dengan kenyataan dilapangan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya koperasi yang tidak lagi aktif. Koperasi yang tidak aktif biasanya adalah koperasi yang bergerak sendiri, sebab koperasi yang bergerak sendiri banyak memiliki kekurangan agar dapat berkembang dengan baik hingga akhirnya banyak koperasi yang bergerak sendiri ini menjadi tidak lagi aktif. Adapun penyebabnya antara lain seperti kurangnya modal, dan perhatian dari pemerintah.

2. Program koperasi tidak dapat dijadikan sebagai program utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengentasan kemiskinan, karena setengah hatinya pemerintah dalam mengelola koperasi hal ini dapat dilihat dari tidak dianggarkannya APBD untuk pengembangan koperasi. Ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang koperasi Bapak Suryanto, yang mengatakan pada tahun 2010 ada dana bantuan dari pemerintah untuk pengembangan koperasi sebanyak 10 juta rupiah kepada setiap unit koperasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Tapi setelah itu pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada lagi dana bagi pengembangan koperasi dari Pemkab Rohul yang dianggarkan di APBD.

Saran

Adapun saran yang coba ditarik dari kesimpulan tersebut adalah :

1. Koperasi harus lebih di tingkatkan lagi mutunya. Karena koperasi mengambil peranan penting dalam perkembangan ekonomi. Salah satunya sebagai wadah untuk pelayanan jasa ataupun hasil pertanian. Dan pemerintah harus lebih memperhatikan lagi pembangunan dan pengembangan koperasi sehingga dapat berperan penting dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat lebih mengoptimalkan kembali pembinaan dan pengembangan koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya koperasi yang tidak aktif dan yang masih belum optimal menjalankan aktifitasnya. Salah satu caranya yaitu dengan menyediakan anggaran dari APBD untuk pengembangan koperasi atau dengan mengundang investor agar mau menginvestasikan dananya untuk pengembangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Byson, *Perencanaan Strategis*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 2004

David, Fred. R, Salemba, *Strategi Manajemen*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2006

Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera

Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang

Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Hadari Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta
- Lexi J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Rangkuti, *Kebijakan Strategi*, ISBN, Jakarta 2006
- Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT. Gramedia, Jakarta 2006
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administratif*. Rineka Cipta: Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Widiyanti, Dra. Ninik, 1994. *Manajemen Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta